

**EVALUASI KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG
DALAM PENDAATAAN PEMILIH PADA
PEMILU LEGISLATIF 2014**

SKRIPSI

*Diajukan Kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Administrasi Publik*



Oleh :

**CHARISMA TRI MULYA
2011/1106449**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2015**

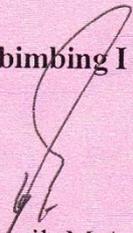
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam
Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014
Nama : Charisma Tri Mulya
NIM : 2011 / 1106449
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2015

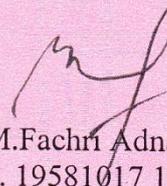
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Dr. Dasril, M.Ag
NIP. 19580422 198703 1 003

Pembimbing II



Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D
NIP. 19581017 198503 1 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

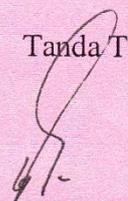
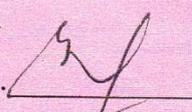
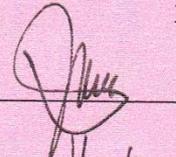
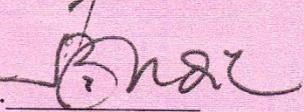
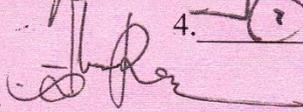
Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Selasa 04 Agustus 2015 pukul 08.00 s/d 10.00 WIB

Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014

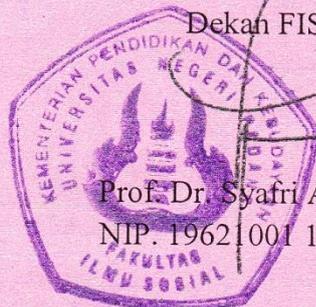
Nama : Charisma Tri Mulya
NIM : 2011 / 1106449
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Jurusan : Ilmu Adminsitrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 04 Agustus 2015

Tim Penguji:

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dr. Dasril, M.Ag	1. 
Sekretaris	: Drs. M.Fachri Adnan, M.Si, Ph.D	2. 
Anggota	: Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D	3. 
Anggota	: Adil Mubarak, S.IP, M.Si	4. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP, M.Si	5. 

Mengesahkan :
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Charisma Tri Mulya

NIM : 2011 / 1106449

Tempat/Tanggal Lahir : Bukittinggi/ 18 Juni 1993

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pendaatan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014 adalah benar merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulis.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Padang, 04 Agustus 2015

Saya yang menyatakan



Charisma Tri Mulya

BP/NIM : 2011/1106449

ABSTRAK

CHARISMA TRI MULYA : NIM 2011/1106449. Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pendaataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya permasalahan pada DPT dalam pemilu yang dilihat dari segi pendataan pemilih, yang juga disertai dengan masih adanya masyarakat kurang mencari informasi tentang data pemilih tetap yang berakhir dengan permasalahan DPT yang bisa mengganggu kelancaran pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014. 2) Hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendataan pemilih pada pemilu legislatif 2014. 3) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam implementasi.

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Jenis datanya adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Sedangkan uji keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber. Kemudian data dianalisis dengan cara reduksi data, analisis data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Komisi Pemilihan Kota Padang masih belum mencapai tujuan yaitu memvalidkan data dari 5 indikator terlaksana baik hanya 3 yaitu kuantitas, ketepatan waktu dan pengawasan dan 2 lainnya belum terlaksana dengan baik yaitu 1) Kualitas, belum maksimalnya pencapaian tujuan untuk memvalidkan data. 2) Sumberdaya yang belum mendukung yaitu pada teknologi yang masih lemah. Untuk meningkatkan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam pemilihan berikutnya KPU Kota Padang melakukan upaya-upaya untuk mengatasi kendala yang ada dalam pendataan pemilih.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum warrahmatullahiwabarrakatu

Alhamdulillahirrabbi'lamin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Evaluasi Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014”**. Tak lupa shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW, Kepada keluarga, sahabat, serta tak lupa juga kita yang senantiasa selalu istiqamah dan ikhlas untuk menjadi umatnya.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Selama penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan banyak pihak yang selalu mendukung penulis secara langsung atau tidak langsung. Maka dengan ketulusan hati, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Yanuar Kiram sebagai Rektor Universitas Negeri Padang.
2. Bapak Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd selaku dekan Fakultas Ilmu Sosial
3. Bapak Drs.Syamsir,M.Si,Ph.D selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Negara yang telah banyak membantu memperlancar penulisan skripsi ini.

4. Ibu Dra.Jumiati , M.Si selaku skeretaris Jurusan Ilmu Administrasi Negara
5. Bapak Dr. Dasril selaku pembimbing I dan Bapak Bapak Drs. M. Fachri Adnan, M.Si, Ph.D. yang telah membimbing penulis dalam menulis skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Bapak Drs.Syamsir,M.Si,Ph.D selaku penguji I dan Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si selaku penguji II serta Ibu Nora Eka Putri, S.IP. M.Si yang telah banyak memberikan saran, kritik, dan masukan dalam penyempurnaan skripsi ini.,
7. Bapak dan Ibu dosen jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai inspirasi penulis menjadi manusia yang memiliki ilmu yang baik dan bernilai.
8. Bapak Drs. M. Sawati selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Padang
9. Bapak Yusrin Trinanda, S.IP selaku Komisioner Divisi Sosialosasi, pendidikan pemilih data informasi dan hubungan antar lembaga
10. Bapak Fahmi S.Sos selaku Kasubag Progran KPU kota Padang.
11. Bapak Zulfli selaku Anggota panwaslu
12. Teristimewa untuk orang tuaku, abang dan kakak tersayang serta keluarga yang telah memberikan Do'a, dorongan dan semangat untuk terus menjadi anak yang berguna dan berprestasi. Dengan do'a, semangat serta dorongan itulah penulis dapat menyelesaikan perkuliahan ini.
13. Rekan-rekanku jurusan Ilmu Administrasi Negara angkatan 2011 terima kasih atas segala kebaikannya.

14. Seluruh sahabat dan teman teman-temanku yang telah membangkitkan semangat studiku, serta telah memberi masukan dan bantuan selama ini, baik dalam penulisan skripsi maupun dalam menjalani studiku selama ini.
15. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang ikut berpartisipasi memberikan bantuan dan dorongan baik moril maupun materil kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang disusun ini masih banyak terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan. Karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun dari semua pihak atau pembaca untuk kesempurnaan tulisan dimasa yang akan datang.

Akhirnya dengan penuh harapan dan do'a semoga penelitian sederhana yang penulis susun ini dapat bermanfaat bagi kita semua terutama bagi penulis. Amin ya rabbal allamin.

Padang, Agustus 2014

CHARISMA TRI MULYA

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	6
C. Pembatasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Fokus Penelitian	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	8
1. Kinerja.....	7
2. Evaluasi Kinerja.....	13
3. Hakikat KPU	17
B. Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Informan Penelitian.....	23
D. Jenis Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	25
F. Teknik Uji Keabsahan Data	26
G. Teknik Analisis Data.....	28
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Temuan Umum.....	30
1. Gambaran Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	30
2. Visi dan Misi	31
3. Tugas dan Fungsi	32
4. Struktur Organisasi	36
B. Temuan Khusus.....	37
C. Pembahasan.....	64
1. Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pendataan Pemilih pada Pemilu Legislatif 2014.....	65
2. Kendala yang dihadapi Komisi Pemiliha Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pemilu Legislatif 2014	71
3. Upaya yang dilakukan Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang dalam Pendataan Pemilih Pada Pemilu Legislatif 2014....	73

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah kecamatan di kota padang.....	37
Tabel 2 Jumlah Kecamatan TPS Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2014.....	38
Tabel 3 Jumlah Pemilih Kota Padang Pemilu Legislatif 2014.....	38
Tabel 4 Kalender Pemilu Legislatif Tentang Pendataan Pemilih Oleh KPU Kota Padang	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Presentase Jumlah Data Yang Tidak Memilih Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2014	4
Gambar 2	Kerangka Konseptual	21
Gambar 3	Struktur Organisasi Kantor Komisi Pemilihan Umum Kota Padang	36

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum (pemilu) di Indonesia ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah amandemen ke-IV UUD 1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga pilpres pun dimasukkan ke dalam bagian pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Sejak tahun 2007 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari pemilihan umum berdasarkan UU No.22 Tahun 2007.

Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai penyelenggara Pemilihan Umum yang dilaksanakan oleh suatu badan bernama Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum bebas dari pengaruh pihak mana pun.

Perubahan penting dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007

meliputi pengaturan mengenai lembaga penyelenggara pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden; serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan kemudian disempurnakan dalam 1 (satu) undang-undang secara lebih komprehensif.

Dalam undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu diatur mengenai KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang permanen dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sebagai lembaga pengawas pemilu. KPU dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya. KPU memberikan laporan kepada Presiden dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-undang ini juga mengatur kedudukan panitia pemilihan yang meliputi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) yang merupakan penyelenggara pemilihan umum yang bersifat *ad hoc*. Panitia tersebut mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan umum dalam rangka mengawal terwujudnya pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Demi mewujudkan KPU dan Bawaslu yang memiliki integritas dan kredibilitas sebagai penyelenggara pemilu, disusun dan ditetapkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal ini bertujuan agar Kode Etik Penyelenggara Pemilu dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum. Untuk mengawasi pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu dibentuk suatu lembaga yang dinamakan dengan Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu.

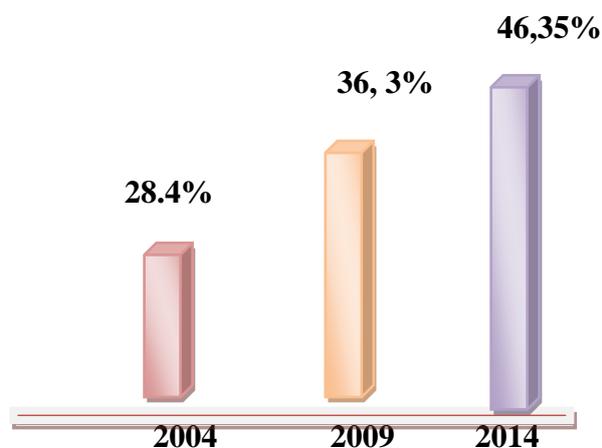
Pemilu merupakan salah satu bentuk perwujudan pelaksanaan demokrasi. Kesuksesan sebuah pemilihan umum setidaknya ditentukan oleh tiga hal penting, yaitu proses penyelenggaraannya, aturan hukumnya, dan penegakan hukumnya. Terkait dengan proses penyelenggaraannya, adalah pesertanya, tahapannya, logistik, dan distribusi, serta pemantau dan partisipasi masyarakat. (Said :2014).

Pemilu saat ini telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena masyarakat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya. Pemilihan umum adalah suatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan, melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen, dan dalam struktur pemerintahan (Mujtahid, 2013).

Rakyat dalam pemilu merupakan unsur dalam pemilu rakyat. Suatu pemilu belum bisa dikatakan berhasil jika rakyat sebagai unsur pokok negara tidak menyalurkan aspirasinya dengan memilih calon legislatif dan pemimpin yang akan memimpin dirinya. Rakyat bisa memilih dalam sistem pemilu Indonesia apabila sudah terdaftar dalam daftar yang dinamakan daftar Data Pemilih Tetap (DPT).

Salah satu permasalahan yang terjadi pada tahun 2014 adalah tentang DPT, yang akan berdampak pada meningkatnya masyarakat Golongan Putih (Golput), masyarakat yang tidak mau menggunakan hak pilihnya. Sikap masyarakat yang seperti itu wajar saja terjadi mengingat masih adanya permasalahan DPT yang belum terselesaikan. Sikap apatis masyarakat itulah yang pada akhirnya membuat adanya masyarakat yang golput. Seharusnya masyarakat harus tetap didorong agar berkontribusi bagi perubahan ke arah yang lebih baik. Jumlah golput bisa kita lihat pada diagram dibawah ini.

Presentase Jumlah data Yang Tidak Memilih Kota Padang Pada Pemilu Legislatif 2014



Gambar 1

(Sumber: KPU Sumbar 2014)

Pemilu 2014 telah selesai dilaksanakan, namun isu Daftar Pemilih Tetap (DPT) bermasalah selalu saja muncul dalam setiap pemilu. DPT yang bermasalah juga akan mengurangi hak kontribusi rakyat, dan akhirnya berdampak kepada pemilu legislatif 2014. Misalnya ada pemilih ganda, ada masyarakat yang belum

terdaftar pada DPT. Padahal DPT merupakan kunci untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil.

KPU membolehkan rakyat yang tidak mempunyai KTP di tempat mereka tinggal, dengan mendatangi KPU kabupaten/kota untuk membawa surat keterangan kependudukannya. Akan tetapi hal ini mungkin kurang sampai ke telinga masyarakat. Melihat dari kronologi kejadian tersebut di atas, artinya jumlah golongan putih (golput) bertambah bukan karena keinginan masyarakat tapi karena mereka tidak mengetahui informasi tentang pemilih yang mungkin saja kurangnya sosialisasi dari KPU dan jajarannya. Padahal KPU Kota Padang telah melakukan beragam bentuk sosialisasi, salah satunya dengan menjalin kerja sama dengan dua media massa lokal di Padang. Melakukan penyebaran berita baik secara lisan maupun tulisan yang berbentuk pamflet atau brosur dan juga dilakukan melalui media sosial dan KPU juga mempunyai *news letter*.

Dengan telah selesainya seluruh tahapan Pemilu 2014, KPU sebagaimana diamanatkan UU Penyelenggara Pemilu perlu melakukan evaluasi dan membuat laporan semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Evaluasi bertujuan melakukan pemetaan dan permasalahan, serta evaluasi juga berguna menarik pelajaran dari hasil, manfaat, dan dampak dari semua kegiatan pemilu. Untuk mengetahui apa saja kekurangan dan kelebihan pelaksanaan pemilu 2014, terkait dengan peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pelaksanaan setiap tahapan pemilu dan pemilih;

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat judul dengan **“Evaluasi Kinerja Komisi Pemilih Umum Kota Padang Dalam Pendataan Pemilih Pada pemilu Legislatif 2014.”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang teridentifikasi dalam proposal penelitian ini adalah:

1. Masih ditemukannya masyarakat yang belum terdata dalam DPT
2. Masih adanya nama yang sudah meninggal terdata di DPT
3. Masih belum akurat data yang dilakukan PPDP dalam melakukan pendataan
4. Masih kurangnya akurasi data pendataan mengakibatkan timbulnya golput yang mencapai 46,35

C. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan arahan pada masalah yang diteliti sehingga maksud dan tujuan tidak menyimpang maka perlu adanya batasan masalah. Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka batasan masalahnya adalah, mengevaluasi kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada pemilu 2014.

D. Perumusan Masalah

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan

1. Bagaimana kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada pemilu legislatif 2014 ?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendataan pemilih ?
3. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul?

E. Fokus Penelitian

Supaya penulisan skripsi ini lebih terfokus dalam mengatasi keterbatasan kemampuan yang peneliti miliki, serta untuk mempertajam objek pembahasan maka penulis membatasi penelitian ini hanya berkaitan tentang permasalahan DPT pada pemilu legislatif kota Padang 2014.

F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja KPU Kota Padang dalam pendataan pemilih pada pemilu legislatif 2014 di kota padang.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul dalam pelaksanaan pendataan pemilih.

G. Manfaat Penelitian

Manfaat suatu penelitian dikelompokkan atas dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Hasil penelitian di harapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi kalangan mahasiswa umumnya dan mahasiswa jurusan Ilmu Administrasi Negara pada khususnya sebagai bahan referensi yang tertarik dalam bidang kajian ini.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi Kantor KPU Kota Padang